

**DAMPAK KEBIJAKAN *TWO STEPS IMMIGRATION PASCA BRITISH
EXIT (BREXIT)* TERHADAP IMIGRAN UNI EROPA TAHUN 2020-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

VIVALDI AIKO PUTRA

20323048

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DAMPAK KEBIJAKAN *TWO STEPS IMMIGRATION PASCA BRITISH
EXIT (BREXIT)* TERHADAP IMIGRAN UNI EROPA 2020-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

VIVALDI AIKO PUTRA

20323048

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**Dampak Kebijakan *Two Steps Immigration Pasca British Exit (Brexit)*
Terhadap Imigran Uni Eropa Tahun 2020-2025**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

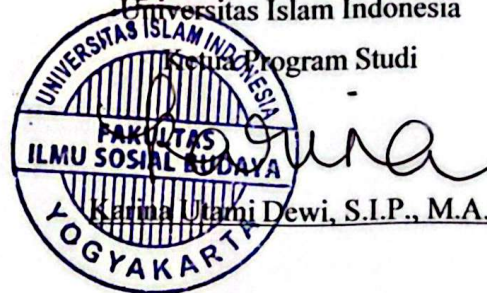


Pada Tanggal

31 Juli 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Juli 2025



Vivaldi Aiko Putra

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Cakupan penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 REGULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TWO STEPS IMMIGRATION	20
2.1. Regulasi Kebijakan <i>Two Steps Immigration</i> Berbasis Point	20
2.2. Implementasi Kebijakan Two Steps Immigration	20
BAB 3 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TWO STEPS IMMIGRATION PASCA BREXIT TERHADAP IMIGRAN UNI EROPA DAN MASYARAKAT INGGRIS 2020-2025	33
3.1. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Sasaran	33
3.2. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Selain Sasaran	33
3.3. Dampak Kebijakan Terhadap Kondisi Saat ini dan Masa Depan	42
3.4. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Secara Langsung	45
3.5. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Tidak Langsung.....	47
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

EEC	European Economic Community
EC	European Community
UE	Uni Eropa
UK	United Kingdom / Inggris
BBM	Bahan Bakar Minyak
EUSS	EU Settlement Scheme
NHS	National Health Service (Layanan Kesehatan Inggris)
ILR	Indefinite Leave to Remain
NMW	National Minimum Wage
IELTS	International English Language Testing System
TOEFL	Test of English as a Foreign Language
SOL	Skilled Occupation List
VOA	Voice of America
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
HPI	High Potential Individual
IHS	Health Surcharge
NAO	National Audit Office
GBP	Pound Sterling

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak kebijakan Two Steps Immigration pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) terhadap imigran Uni Eropa selama periode 2020–2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kelompok imigran Uni Eropa baik dari segi akses legalitas tinggal, ekonomi, sosial, maupun hak-hak administratif, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kelompok non-imigran dan sistem pemerintahan Inggris secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh Thomas R. Dye sebagai kerangka analisis dan membahas lima aspek utama: dampak terhadap kelompok sasaran, kelompok non-sasaran, kondisi saat ini dan masa depan, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan imigran, baik dalam akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal permanen, maupun hak sosial. Kebijakan ini juga memengaruhi kelompok lain seperti pengusaha, universitas, dan masyarakat umum akibat kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya beban sosial. Dalam jangka panjang, kebijakan ini menimbulkan tantangan administratif, sosial, dan ekonomi yang kompleks, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut.

Kata-kata kunci: Brexit, Two Steps Immigration, Imigran Uni Eropa.

ABSTRACT

This study examines the impact of the Two-Step Immigration policy after the UK's exit from the European Union (Brexit) on EU immigrants during the period 2020–2025. The purpose of this study is to comprehensively analyze how the policy affects EU immigrant groups in terms of access to legal residence, economic, social, and administrative rights, and to evaluate its impact on non-immigrant groups and the UK government system as a whole. This study uses Thomas R. Dye's public policy theory as an analytical framework and discusses five main aspects: impact on target groups, non-target groups, current and future conditions, direct costs, and indirect costs. The results of the study show that this policy has a significant impact on the lives of immigrants, both in terms of access to employment, permanent residence, and social rights. This policy also affects other groups such as employers, universities, and the general public due to labor shortages and increasing social burdens. In the long term, this policy poses complex administrative, social, and economic challenges, so further evaluation is needed.

Keywords: Brexit, Two Steps Immigration, European Union immigrants.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inggris adalah sebuah negara kesatuan yang berdiri di bawah sistem monarki konstitusional dan mengadopsi sistem parlementer. Kedudukan pemerintahan pusat berada di ibukota negara Inggris, yaitu London. Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales adalah negara-negara yang termasuk dalam kedaulatan Britania Raya. Pemerintahan Britania Raya dijalankan dalam bentuk parlementer dimana kekuasaan dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat (SD and Sherin 2018).

Pasca Perang Dunia II Eropa sadar untuk memulihkan kembali perekonomiannya. Keinginan negara-negara di Eropa ini direalisasikan oleh enam negara yakni Italia, Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, dan Luxemburg dengan membentuk *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957 yang didirikan berdasarkan Perjanjian Roma tahun 1957. Pada tahun 1965 dilakukan penggabungan antara ECSC, EEC dan *European Atomic Energy Community Euroatom*, menjadi Masyarakat Eropa (*European Community/EC*) berdasarkan Perjanjian Brussel, yang memuat tiga pilar kerjasama yaitu Pasar Tunggal Eropa, Kebijakan Luar Negeri dan kemudahan untuk kebijakan manajemen bersama yang semakin luas. Kebijakan – kebijakan yang diatur dalam 3 (tiga) perjanjian sebelumnya, kemudian diatur Perjanjian Maastricht menjadi tonggak utama pembentukan resmi Uni Eropa yang turut juga menetapkan aturan yang jelas untuk mata uang tunggal masa depan serta untuk kebijakan luar negeri dan

keamanan dan kerjasama yang lebih erat dalam keadilan dan urusan dalam negeri. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 November 1993 (Stefanie 2022).

Pada tahun 1960 pandangan Inggris mulai berubah karena Inggris menyadari pentingnya menjalani kerjasama yang erat dengan negara – negara tetangganya di Eropa. Hingga pada akhirnya di tahun 1973 Inggris resmi mejadi anggota dalam Uni Eropa (Darmayadi 2018). Setelah diterima dan bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris harus melakukan penyesuaian terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Uni Eropa. Inggris merupakan negara yang aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan, perumusan kebijakan dan pendanaan, serta sebagai penasihat yang seringkali memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di Uni Eropa. Inggris juga merupakan salah satu negara dengan pendapatan nasional tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Selama menjadi bagian dari Uni Eropa, Inggris juga mendapat berbagai keuntungan, seperti pengurangan hambatan *tariff* bagi sistem perdagangan, serta kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor di kawasan Eropa (SD and Sherin 2018).

Bergabungnya Inggris memang membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi Inggris melebihi negara Eropa lain seperti Jerman dan Perancis. Namun Inggris mengalami perbedaan pendapat dengan Uni Eropa dan munculnya permasalahan baru di Inggris pasca bergabungnya Inggris ke Uni Eropa baik permasalahan sosial maupun politik. Hal ini memicu Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, yang kemudian disebut *Brexit*.

Brexit merupakan keputusan masyarakat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa yang dicanangkan oleh David Cameron sejak masa kampanyenya tahun

2016. Pada tahun 2016 isu anti imigran terus menerus bergulir di Inggris dan ada banyak tokoh politik di Inggris yang mengangkat isu ini karena didukung oleh banyak rakyat Inggris salah satunya adalah eks walikota London Boris Johnson. Hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang setuju akibat banyaknya permasalahan yang muncul yang dilakukan oleh imigran. Semakin banyaknya imigran yang masuk semakin terciptanya lingkungan kumuh, munculnya kriminalitas yang dilakukan imigran, tidak akuranya warga asli dengan imigran, dan lainnya. Hal ini membuat demo yang dilakukan warga asli Inggris untuk Inggris keluar dari Uni Eropa dan mengurus imigrasi sendiri. Referendum dilaksanakan pada tahun 2016 yang hasilnya mayoritas warga Inggris memilih akan keluar dari Uni Eropa (Kultsum and Wiyanarti 2018). Menurut data dari *Electoral Commission of EU Referendum*, sebanyak 48,1% suara menjawab “tetap di Uni Eropa” untuk tetap menginginkan Inggris di Uni Eropa sedangkan 51,9% menjawab “keluar dari Uni Eropa” untuk mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa (Kaukab and Yuwono 2020).

Representatif masyarakat Inggris menunjukkan fenomena populisme, yakni melihat bahwa politik merupakan ekspresi dari rakyat kebanyakan. Kebijakan referendum Brexit dianggap sesuai dengan prinsip demokrasi yang menyerahkan hak politik secara penuh kepada masyarakat Britania Raya, khususnya Inggris. Prinsip demokrasi tersebut yang akhirnya membawa isu referendum Britania Raya menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya, kebijakan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa bukan hanya akan memberi dampak pada hubungan kedua belah pihak saja, melainkan juga akan mempengaruhi negara-negara lainnya dalam skala internasional, mengingat Britania Raya merupakan salah satu

negara maju dunia sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam tatanan sistem politik dan ekonomi internasional (Pertiwi 2018).

Proses *Brexit* ini membutuhkan waktu selama kurang lebih dua tahun untuk proses peresmian. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan tentang proses keluarnya anggota Uni Eropa yang diatur dalam *Lisbon Treaty*. Terdapat pasal 50 dalam *Lisbon Treaty* tersebut yang menyatakan bahwa jika suatu Negara ingin mengundurkan diri dari keanggotaannya, maka wajib untuk memberikan notifikasi kepada Dewan Uni Eropa selama kurun waktu dua tahun, agar dapat melakukan negosiasi dengan dewan dan menetapkan syarat atas penarikan dirinya (Darwis and Howay 2021) .

Alasan utama Britania Raya keluar dari Uni Eropa dikarenakan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh Britania Raya saat menjadi negara anggota Uni Eropa. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh Britania Raya antara lain menyangkut permasalahan imigran, perdagangan, perpajakan, serta kebijakan negara yang semuanya tidak lepas dari pengaruh Uni Eropa (Rezkyniine, Tulung and Sampe 2018).

Inggris menganggap permasalahan imigran sebagai permasalahan yang harus diselesaikan. Banyak masyarakat Inggris merasa perlu mengontrol masuknya imigran, terutama dari negara-negara Uni Eropa yang sebelumnya bebas bergerak di bawah prinsip "*free movement*". keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa terkait dengan isu imigran yang dianggap merugikan bagi warga Britania Raya, karena kehadiran para imigran tersebut menyebabkan persaingan yang sangat ketat mengenai lapangan pekerjaan antara para imigran baik yang berasal dari Uni Eropa maupun non-Uni Eropa dengan warga asli

Britania Raya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permasalahan imigran merupakan sebuah permasalahan krusial yang pada akhirnya mendorong terjadinya *Brexit*, dengan bergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa menyebabkan tidak adanya kontrol penuh Inggris terkait arus masuk imigran kedalam wilayah negaranya. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan *Open Door Immigration Policy* yang mewajibkan Negara Uni Eropa untuk berbagi tanggung jawab terkait penerimaan imigran, khususnya dari Negara non-Uni Eropa (Darwis and Howay 2021).

Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Inggris tidak lagi terikat kepada kebijakan imigrasi milik Uni Eropa dan mengesahkan kebijakan *two steps immigration*. Kebijakan *two steps immigration* mulai disahkan pada 31 Januari tahun 2020 dan menuai pro kontra serta dampak yang signifikan. *Two steps immigration* adalah pembagian visa menjadi dua bagian yakni visa sementara dan visa tinggal permanen. Pemberian visa ini berdasar pada skill keterampilan khusus, tingkat pendidikan, riwayat kesehatan, dan jenis pekerjaan yang dituju imigran. Selain itu persyaratan seperti minimal gaji, izin tinggal, dan biaya layanan administrasi kesehatan dibutuhkan untuk mendapatkan visa tinggal permanen di Inggris.

Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa menyebabkan Inggris mempunyai kewajiban yang harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi Uni Eropa. Salah satu kebijakan Uni Eropa yang harus diikuti oleh Inggris adalah kebijakan "*Open Door Immigration Policy*" yang diikuti sejak tahun 1973 dimana kebijakan tersebut mewajibkan Inggris membuka lebar keamanannya kepada para imigran sehingga para

imigran dapat dengan bebas masuk dan menetap di negaranya. Walaupun kebijakan tersebut didasari oleh alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan bersama di dalam organisasi Uni Eropa, namun hal ini malah membuat Inggris kehilangan kontrol terhadap perbatasannya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan arus imigran yang cukup signifikan memasuki wilayah negara tersebut.

Kebijakan *free movement of persons* atau dikenal dengan *Open Door Immigration Policy* ini menjamin konsep kewarganegaraan Uni Eropa, yaitu adanya hak warga negara anggota untuk bergerak atau berpindah dan bebas berada di dalam wilayah negara anggota, karena setiap pemegang kewarganegaraan dari salah satu negara anggota Uni Eropa secara otomatis juga menjadi warga negara Uni Eropa. Hal ini menyebabkan kian bertambahnya imigran dari negara anggota Uni Eropa datang ke UK.

Tujuan dari kebijakan *free movement of persons* adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor di negara-negara anggota dengan memberikan kebebasan bagi warga Uni Eropa untuk bekerja, tinggal, dan menetap di negara anggota lainnya tanpa memerlukan visa dan hambatan administratif yang berlebihan. Kebijakan *free movement of persons* terkait erat dengan prinsip umum nondiskriminasi atas dasar kebangsaan, berkaitan dengan pekerjaan, remunerasi, dan kondisi kerja, juga ketentuan mengenai koordinasi sosial sehingga warga negara tidak kehilangan hak jaminan sosial ketika berada di negara anggota lainnya untuk bekerja, belajar, atau bahkan telah pensiun (Francisca, Trihastuti and Roisah 2017).

Permasalahan yang ditimbulkan akibat kebijakan "*Open Door Policy*" Inggris dan Uni Eropa meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya tekanan pada layanan publik, seperti sistem kesehatan, pendidikan, dan perumahan, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami arus imigrasi tinggi. Hal ini sering kali menyebabkan keluhan dari masyarakat lokal yang merasa bahwa sumber daya publik menjadi semakin terbatas. Selain itu, kebijakan ini juga memicu persaingan di pasar tenaga kerja, terutama untuk pekerjaan berupah rendah, yang dapat menekan upah lokal dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Persaingan ini terkadang memunculkan sentimen negatif terhadap imigran, sehingga memicu ketegangan sosial di beberapa komunitas.

Selama menjadi anggota Uni Eropa, Inggris telah mengimplementasikan kebijakan "*Freedom of Movement*" yang diterapkan oleh negara-negara anggota. Kebijakan ini telah memberikan dampak yang besar bagi negara Inggris dan menimbulkan kekhawatiran bagi warga negara asli Inggris terkait berkurangnya kesempatan untuk bekerja yang mana memberikan dampak terhadap bertambahnya tingkat pengangguran di Inggris. Upah yang didapat oleh banyak pekerja hanya *National Minimum Wage (NMW)* atau bahkan dibawah *NMW* di Inggris, sehingga menyebabkan adanya penurunan GDP setiap tahunnya. Selain dampak ekonomi, aspek sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang memicu pelaksanaan Referendum Brexit.

Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah imigran yang masuk ke Inggris, yang kemudian memunculkan ketidakpuasan warga asli Inggris. Posisi Uni Eropa sebagai organisasi supranasional membuat

Inggris menjadi tidak optimal dalam menjaga kedaulatan negaranya sendiri terutama dalam pengambilan keputusan nasional. Ketidakpuasan ini akhirnya memuncak dalam keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dan mengeluarkan Referendum Brexit (Ramli 2024).

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuktikan bahwa Inggris ingin mengamankan kepentingan nasionalnya, khususnya di Eropa. Inggris merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa telah mengancam kedaulatan negara Inggris sehingga Inggris memutuskan untuk melaksanakan referendum.

Salah satu penyebab Inggris untuk keluar dari Uni Eropa adalah Kebijakan Uni Eropa “*Open Door Immigration Policy*” yang terlalu ramah kepada imigran dari negara lain. Hal ini membuat Inggris menjadi negara penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan total 7,5 juta imigran atau sekitar 9,3% dan diprediksikan pada tahun 2030 jumlah imigran yang akan masuk Inggris sebanyak 5,23 juta imigran hanya dalam kurun waktu setahun. Dengan dilakukan Brexit, Inggris berharap akan mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya, dapat berhubungan dengan kekuatan ekonomi dengan negara lain dan dapat secara penuh mengontrol perbatasan masuknya Imigran ke negaranya (Stefanie 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana dampak kebijakan *two steps immigration pasca British Exit “Brexit”* terhadap imigran Uni Eropa di Inggris?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dampak kebijakan *two steps immigration pasca "British Exit" Brexit* terhadap imigran Uni Eropa yang ada di negara Inggris.
2. Untuk menganalisis tanggapan dari imigran mengenai kebijakan *two steps immigration* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Inggris.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana imigran asal negara-negara uni eropa yang tinggal di Inggris mengalami dampak langsung dari kebijakan *Two Steps Immigration pasca Brexit*. Peneliti bisa mempelajari bagaimana imigran dari negara anggota uni eropa yang tinggal di Inggris dapat terpengaruh oleh kebijakan *Two Steps Immigration*, baik dalam hak izin tinggal, hak kerja, maupun akses terhadap layanan social. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2020 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk mencakup tahun-tahun awal penerapan kebijakan setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa hingga tahun-tahun awal dampak kebijakan terlihat secara signifikan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam memperoleh landasan ilmiah perihal penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Jurnal pertama, menurut penelitian yang dilakukan (Hartanto 2018) yang berjudul “Referendum Brexit Dan Kembali Mengemukanya Kedaulatan Negara Serta Dampaknya Bagi Dunia Dan Indonesia” dalam jurnalnya menjelaskan bahwa keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum *Brexit* didorong oleh sejumlah permasalahan dan alasan utama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan kebijakan imigrasi Uni Eropa. Salah satu alasan mendasar adalah kebijakan Uni Eropa yang memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara anggotanya, yang mengakibatkan peningkatan jumlah imigran di Inggris secara signifikan. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Inggris terkait dampak ekonomi, budaya, dan sosial dari imigrasi yang dianggap membebani layanan publik dan menciptakan persaingan kerja yang ketat.

Selain itu, Hartanto juga menjelaskan bahwa isu kedaulatan memainkan peran penting dalam keputusan Inggris. Banyak warga Inggris merasa bahwa keanggotaan dalam Uni Eropa membatasi kemampuan negara untuk membuat kebijakan secara mandiri, termasuk dalam hal pengendalian perbatasan dan imigrasi. Isu ini kemudian menjadi salah satu poin utama dalam kampanye pro-*Brexit*, yang menyerukan kembalinya kontrol penuh atas kebijakan nasional. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tidak hanya berdampak pada hubungan Inggris-Uni Eropa, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi dunia internasional, termasuk Indonesia. Ia menggaris bawahi

perlunya penyesuaian kebijakan perdagangan dan diplomasi untuk menghadapi dinamika baru *pasca-Brexit*.

Jurnal kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kalantaryan, et al. 2021) yang berjudul “*Immigration and integration in rural areas and the agriculture sector: An EU perspective*” membahas bagaimana wilayah pedesaan di Uni Eropa menjadi ruang penting dalam dinamika migrasi, khususnya dalam sektor pertanian. Jurnal ini menyoroti bahwa banyak imigran, baik dari negara anggota Uni Eropa maupun dari luar, mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor pertanian pedesaan yang kian ditinggalkan oleh penduduk lokal. Pola ini terjadi karena pekerjaan di bidang tersebut cenderung bersifat musiman, bergaji rendah, dan melibatkan kondisi kerja yang berat—sehingga kurang diminati oleh warga negara asli.

Jurnal ini juga menunjukkan bahwa meskipun para imigran memberikan kontribusi penting bagi ketahanan sektor pertanian, mereka sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi sosial dan ekonomi. Banyak dari mereka tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan publik dan peluang pendidikan atau pelatihan, sehingga memperbesar risiko kemiskinan dan keterpinggiran sosial. Selain itu, distribusi imigran di wilayah pedesaan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik spesifik dari sistem pertanian di tiap negara, seperti intensitas penggunaan tenaga kerja dan jenis komoditas yang diproduksi.

Para peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan migrasi di Uni Eropa perlu lebih memperhatikan konteks pedesaan dan sektor pertanian, tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan. Ditekankan pula pentingnya pendekatan kebijakan yang

mampu menjamin kondisi kerja layak, akses terhadap layanan dasar, dan integrasi sosial yang menyeluruh bagi para pekerja migran di desa. Dengan begitu, peran mereka dalam menopang sektor pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan dan adil.

Jurnal ketiga, menurut penelitian yang dilakukan (Dennison and Geddes 2018) yang berjudul “*Brexit And The Perils Of ‘Europeanised’ Migration*” dalam jurnalnya membahas bagaimana Brexit muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadirkan oleh kebijakan migrasi yang mereka sebut sebagai *Europeanised migration*. Kebijakan ini, yang diatur oleh prinsip kebebasan bergerak Uni Eropa, memberikan hak kepada warga negara anggota untuk tinggal dan bekerja di negara mana pun dalam blok tersebut tanpa hambatan yang signifikan.

Jurnal ini juga menyebutkan bahwa kebijakan menjadi salah satu faktor utama di balik meningkatnya jumlah imigran di Inggris, yang kemudian memunculkan kekhawatiran publik tentang dampaknya terhadap pasar tenaga kerja, layanan publik, dan identitas nasional. Mereka menjelaskan bahwa bagi banyak pendukung *Brexit*, kebijakan imigrasi Uni Eropa dilihat sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional Inggris dan kemampuannya untuk mengatur perbatasannya sendiri. *Brexit* memungkinkan Inggris untuk mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih terfokus pada kepentingan nasional, seperti sistem berbasis poin (*point-based system*) yang membatasi migrasi dan mengutamakan keterampilan tertentu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kebijakan publik. Dalam bukunya yang berjudul “*Understanding public policy*” Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah baik tidak dilakukan maupun akan dilakukan. Dimana dampak kebijakan merupakan seluruh efek yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pada kondisi kehidupan nyata. Dalam mengambil sebuah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat secara langsung baik secara internal maupun eksternal negara tersebut. Kondisi internal dan eksternal ini nantinya berpengaruh terhadap citra negara karena hal itu dalam pembuatan kebijakan diperlukan adanya pertimbangan terlebih dahulu baik dipertimbangkan kepentingan nasional negaranya, kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya negara tersebut (Afinotan 2014).

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan konsep evaluasi dampak kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye pada bukunya yang berjudul “*Understanding public policy*” kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Dimana dampak kebijakan publik merupakan seluruh efek yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pada kondisi nyata. Karena itu dalam mengambil sebuah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat secara langsung baik secara internal maupun eksternal negara. Menurut Thomas R. Dye terdapat 5 indikator dalam menentukan dampak kebijakan, antara lain:

1. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Sasaran

Kebijakan publik bertujuan untuk memberikan pengaruh langsung pada kelompok yang menjadi target atau sasaran utama kebijakan. Dampak ini bisa berupa perubahan positif, seperti peningkatan kesejahteraan, akses lebih baik ke layanan publik, atau keuntungan lainnya. Namun, dampaknya juga dapat bersifat negatif, seperti menimbulkan ancaman, ketidaknyamanan, atau kerugian bagi kelompok sasaran. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelompok sasaran tersebut (Dye 2017, 54).

2. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Selain Sasaran

Selain kelompok sasaran utama, kebijakan publik juga dapat memengaruhi kelompok lain di luar target yang dituju. Dampak ini sering kali tidak direncanakan, tetapi tetap signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dampaknya dapat berupa efek positif, seperti manfaat tambahan bagi masyarakat umum, atau efek negatif, seperti kerugian bagi kelompok tertentu yang tidak termasuk dalam target kebijakan (Dye 2017, 54).

3. Dampak Kebijakan Terhadap Kondisi Saat Inidan Masa Depan

Kebijakan publik memiliki konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti pola ekonomi, kondisi sosial, atau dinamika politik masyarakat. Indikator ini mempertimbangkan bagaimana kebijakan memengaruhi stabilitas dan perkembangan masyarakat saat ini, serta bagaimana dampaknya dapat dirasakan di masa depan (Dye 2017, 54).

4. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Secara Langsung

Setiap kebijakan membutuhkan sumber daya, termasuk dana dan waktu, untuk diimplementasikan. Indikator ini menilai sejauh mana efisiensi biaya

pelaksanaan kebijakan dan apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang diharapkan. Efektivitas biaya menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut layak diterapkan dan tidak membebani anggaran secara berlebihan (Dye 2017, 55).

5. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Tidak Langsung

Kebijakan yang diambil sering kali mengabaikan atau mengesampingkan kebijakan alternatif lain. pengaruh kebijakan publik yang menimbulkan pengeluaran atau kerugian tidak secara langsung tercatat dalam anggaran atau laporan resmi, tetapi tetap berdampak signifikan terhadap masyarakat atau sektor tertentu (Dye 2017, 55).

Imigran terkadang dibutuhkan beberapa negara karena jelas menghasilkan devisa dan pajak bagi negaranya. Selain itu imigran juga menjadi sumber daya manusia yang bekerja dan menggerakkan roda perekonomian di negara tersebut. Akan tetapi, imigran juga seringkali menjadi masalah bagi sebuah negara karena membludaknya jumlah imigran yang masuk ke sebuah negara seringkali beriringan dengan meningkatnya angka kriminalitas. Negara dapat mengontrol dan membuat kebijakan mengenai imigrasi berdasarkan peraturan yang dimiliki sebuah negara.

Adanya imigran di sebuah negara mengubah homogenitas di sebuah negara dan memunculkan kelompok minoritas baru di sebuah negara. Oleh karena itu, biasanya sebuah negara membuat kebijakan mengenai imigrasi berdasarkan dinamika politik regional di negaranya maupun dinamika politik internasional. Tetapi Inggris tidak dapat melakukan hal ini ketika hal ini ketika bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa sangat mendukung masalah imigrasi di dunia

dengan membuat kebijakan kebijakan yang memungkinkan negara anggota UE menampung imigran.

Pasca exit dari organisasi Uni Eropa, Inggris mengadopsi kebijakan yang dimiliki oleh Australia pada tahun 1989. Inggris membuat kebijakan dimana imigran diharuskan memiliki visa kerja dengan penilaian kriteria tertentu. Kriteria yang dinilai seperti kapabilitas skill individu, pengalaman dalam bekerja, dan penilaian usia. Untuk imigran yang menginginkan tempat tinggal permanen diwajibkan lulus uji kesehatan dan juga bebas HIV/AIDS. Apabila seseorang memiliki rekam jejak kriminalitas maka negara berhak untuk mendeportasi imigran.

1.7 Argumen Sementara

Pada penelitian ini, berdasarkan dengan data-data yang ada, salah satu alasan Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa karena adanya permasalahan kebijakan imigran oleh Uni Eropa di Inggris. Hal ini membuat Inggris memutuskan keluar dari *European Union* karena ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah Inggris terkait permasalahan imigran di Inggris. Bagi pemerintah Inggris, kebijakan baru ini dianggap perlu untuk mengatasi tingginya jumlah imigran yang masuk ke negara tersebut. Namun, bagi para imigran, kebijakan tersebut dapat menjadi ancaman karena adanya pembatasan imigran dan seleksi yang lebih ketat untuk masuk atau menetap di Inggris.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye untuk menganalisis dampak *Brexit* terhadap kebijakan imigrasi pemerintah Inggris. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan baru seperti *Two Steps Immigration* memengaruhi kehidupan para imigran di Uni Eropa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan respons politik pemerintah Inggris terhadap *Brexit*, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi para imigran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses sistematis dan mendalam untuk mengolah, memeriksa, serta menginterpretasikan data penelitian guna menemukan makna yang komprehensif. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari sebelum, selama, dan setelah di lokasi, dengan fokus utama pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin and sa'diyah 2024) .

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa dan membuat kebijakan imigrasi baru di negaranya pasca *Brexit*. objek penelitian ini adalah Imigran Uni Eropa yang terdampak oleh kebijakan *Two Steps Immigration pasca-Brexit*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Library Research*. metode *Library Research* merupakan metode yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan website. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dijadikan rujukan dalam menjelaskan serta mendukung analisis penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data melalui riset dari berbagai sumber yang terdiri atas buku, jurnal, serta sumber-sumber dari internet. Setelah data terkumpul, penulis menentukan topik penelitian yang relevan. Topik tersebut dirumuskan berdasarkan kajian literatur yang mendalam terhadap referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan masalah penelitian secara jelas dan sistematis. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menjelaskan permasalahan berdasarkan fakta yang valid dan mendukung tujuan penelitian yang dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada BAB I: Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, yang mencakup penjelasan tentang sejarah Inggris bergabung dengan Uni Eropa, alasan diadakannya referendum *Brexit*, serta keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka dan metodologi penelitian.

Pada Bab II: Bab ini membahas kebijakan imigrasi Inggris sebelum dan sesudah keluar dari Uni Eropa. Penjelasan mencakup kebijakan imigrasi yang diterapkan Inggris saat masih berada di bawah naungan Uni Eropa, serta kebijakan imigrasi baru yang dikenal dengan istilah *Two Steps Immigration*. Bab ini juga membahas teori-teori yang relevan, termasuk teori dampak kebijakan publik yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

Pada Bab III: Bab ini menganalisis dampak kebijakan *Two Steps Immigration* terhadap imigran Uni Eropa *pasca-Brexit* menggunakan teori

dampak kebijakan publik untuk menentukan apa saja dampak yang diterima oleh imigran di Inggris. Bab ini juga menguraikan perspektif dan reaksi para imigran terhadap kebijakan tersebut.

Pada Bab IV: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis, serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB 2

REGULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TWO STEPS*

IMMIGRATION DI INGGRIS

2.1. Regulasi Kebijakan *Two Steps Immigration* Berbasis Point

Meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke negara Inggris memunculkan urgensi tersendiri di kalangan pemerintah maupun masyarakat Inggris. Hal ini lah yang membuat pemerintah Inggris berwenang untuk membentuk sebuah kebijakan mengenai penanganan imigran internasional yang masuk ke negaranya. Pemerintah Inggris dan menteri kabinetnya akan mengadopsi kebijakan yang sama dengan kebijakan pemerintah Australia terkait imigran dan pencari suaka yang dianggap sudah berhasil dalam menangani masalah serupa yaitu kebijakan “*Two Steps Immigrations*”. Dengan mengadopsi kebijakan tersebut, diharapkan kontrol terhadap arus imigrasi akan semakin ketat dan pembatasan terhadap jumlah imigran semakin jelas (SD and Sherin 2018).

Sebelumnya kebijakan *Open Door Immigration Policy* atau *free movement of persons* yang diterapkan oleh Uni Eropa dimana kebijakan tersebut mewajibkan Inggris membuka lebar keamanan perbatasannya kepada para imigran sehingga para imigran dapat dengan bebas masuk dan menetap di negaranya. Walaupun kebijakan tersebut didasari oleh alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan bersama di dalam organisasi Uni Eropa, namun hal ini malah membuat Inggris kehilangan kontrol terhadap perbatasannya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan arus imigran yang cukup signifikan memasuki wilayah negara tersebut (Putra, Susanti and Dewi 2016).

Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan arus imigrasi dan memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat memasuki Inggris. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai dampak imigrasi terhadap pasar tenaga kerja dan layanan publik. Dengan demikian, Inggris berharap dapat mengelola imigrasi secara lebih efektif pasca-Brexit.

Pembentukan rancangan kebijakan dilakukan oleh Inggris setelah referendum Brexit, dengan membentuk kebijakan “*two steps immigration*” yaitu visa jangka pendek dan penduduk tetap, dimana dalam permohonan penduduk tetap terdapat beberapa persyaratan yaitu:

1. Penilaian Keterampilan

Pelamar penduduk tetap (PR) wajib mengikuti penilaian keterampilan untuk mengetahui keterampilan yang dimilikinya dan apakah pekerjaan pelamar tersebut termasuk dalam daftar *Skill Occupation List (SOL)*.

2. Kemampuan Berbahasa Inggris

Pemohon visa PR wajib memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan skor IELTS minimal 7.0 untuk semua bidang (berbicara, mendengar, membaca, menulis).

3. Aturan Sistem Berbasis Poin

Poin ini akan diperoleh pelamar dengan belajar atau bekerja. Besarnya poin bisa bergantung pada tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan juga lama studi atau bekerja. Semakin banyak poin yang didapat maka peluang untuk mendapatkan Permanent Residency akan semakin besar.

4. Bekal Medis dan Karakter

Dalam permohonan visa PR, pemohon juga diharuskan mengikuti beberapa tes, antara lain tes kesehatan dan karakter. Hal ini dilakukan agar penerima visa PR memang merupakan orang yang sehat dan juga berkarakter baik (Nurtyandini 2022).

Hal ini dimaksudkan agar para pendatang yang masuk ke negara tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri pekerjaan yang dibutuhkan. Seleksi pendatang yang akan masuk ke Inggris akan dilakukan dan harus melewati berbagai tahapan tes fisik dan psikologis. Sama seperti di Australia, imigran yang akan bekerja di Inggris harus memiliki visa kerja dengan berbagai kriteria seperti penilaian pengalaman kerja, kualifikasi kemampuan individu, dan pemilihan usia. Sedangkan bagi pendatang yang ingin menetap secara permanen, harus memiliki visa tinggal permanen dan harus melewati beberapa persyaratan. Diantaranya tahapan tes kesehatan dan komunikasi (Putra, Susanti and Dewi 2016).

Pada kategori kesehatan, Inggris melakukan seleksi dengan melihat kondisi fisik serta riwayat kesehatan calon imigran. Melalui kategori kesehatan, Inggris melihat apakah calon imigran memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan kriteria pekerjaan yang tersedia dan apakah calon imigran tersebut memiliki riwayat penyakit yang terutama memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan apakah calon imigran tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang pernah mengalami wabah penyakit menular seperti Covid-19 dan virus Ebola (Brid, et al. 2023). Pada kategori komunikasi, pendatang harus bisa berbahasa Inggris. Inggris juga telah menetapkan standarisasi kemampuan berbahasa, salah satunya adalah 60 tes IELTS dengan

skor minimal 7. Hal ini dimaksudkan agar para calon imigran ketika diterima dan langsung terjun ke dunia kerja dapat melakukan pekerjaan secara maksimal tanpa menghambat komunikasi (IDP 2025).

Jadi berdasarkan paparan diatas Inggris mengadaptasi kebijakan imigrasi Australia, khususnya *Skill Assisment* dimana para imigran harus memiliki kemampuan khusus jika ingin masuk ke Inggris. Sehingga para pendatang bisa segera terjun ke dunia kerja dan bisa berkomunikasi dengan baik. Berbeda dengan sebelumnya ketika Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, Inggris harus mengikuti peraturan UE yang membuat para imigran bebas masuk ke Inggris tanpa memiliki kemampuan khusus yang berdampak negatif seperti imigran melakukan tindakan kriminalitas (VOA 2018).

Pasca Referendum Brexit, pemerintah Inggris mulai menerapkan kebijakan *Points Based Immigration System* yang merupakan sistem imigrasi baru berbasis poin yang mana poin-poin tersebut dapat diperoleh dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh imigran agar dapat pergi ataupun menetap ke Inggris. Sebagai syarat untuk memenuhi sistem tersebut, para imigran harus mencapai minimum 70 poin untuk mendapatkan visa, diantaranya dibagi menjadi 3 tingkat yaitu:

1. Tingkat 1 (*Exceptional Talent / Global Leaders*)

Visa tingkat 1 ini ditujukan untuk para pemimpin global yang sudah diakui seperti pemimpin masa depan pada bidang sains, humaniora, teknik, seni dan teknologi digital, pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan. Ilmuwan dan peneliti unggulan juga dapat mengambil manfaat dari proses pengesahan yang lebih cepat sebagai bagian dari skema STEM jalur cepat. Pada tingkat ini, visa tersebut

digunakan oleh para pemimpin negara yang mana akan diberikan kemudahan dalam proses imigrasinya. Kebijakan visa tersebut telah dipakai bukan hanya Inggris (baik sebelum ataupun setelah referendum), bahkan hampir di seluruh negara menggunakan kebijakan visa ini apabila ada pemimpin negara ataupun pemimpin yang berskala global yang akan mendatangi negaranya baik formal ataupun informal.

2. Tingkat 2 (*General*)

Visa tingkat 2 ditujukan untuk pekerja dengan jangka waktu panjang. Pekerja untuk mendapatkan visa ini harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kriteria oleh para pemberi pekerjaan yang mana rute tersebut telah didukung penuh oleh para pemberi kerja untuk pekerja terampil. Visa tingkat 2 ini juga mengizinkan para imigran untuk dapat berpindah tempat kerja dari perusahaan yang bersifat multinasional yang mana perusahaan tersebut akan membuat cabang baru di Inggris. Kebijakan visa ini berbeda dengan kebijakan visa Inggris sebelum Referendum Brexit. Pada kebijakan visa tingkat 2 sebelum Referendum Brexit, pekerja yang berasal dari Uni Eropa akan dengan mudah mendapatkan visa tingkat 2 tersebut dengan hanya menyertakan paspor. Berbeda dengan pekerja dari luar Uni Eropa yang harus melewati beberapa prosedur tertentu untuk mendapatkan visa tingkat 2 tersebut akibat dari kebijakan Uni Eropa yaitu Freedom of Movement. Oleh karena itu, dengan telah dilaksanakannya Referendum Brexit, semua pekerja baik yang berasal dari Uni Eropa ataupun dari luar Uni Eropa memiliki prosedur yang sama dengan tujuan setiap pekerja yang ingin bekerja di Inggris memiliki kesempatan yang sama.

3. Tingkat 3 (*Temporary*)

Visa tingkat 3 ini ditujukan pada para pelajar yang melanjutkan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi. Visa ini akan diperbaharui atau ditingkatkan apabila pelajar yang sudah menempuh tingkat pendidikan setara dengan gelar Ph.D. (S-3) ingin melanjutkan jenjang karirnya di Inggris. Hal tersebut akan didukung penuh oleh pemerintah Inggris agar keahlian yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Sedangkan pelajar dari luar Uni Eropa harus ditambahkan dengan surat lulus uji kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL/IELTS), dan kemampuan finansial untuk dapat membiayai biaya kehidupan untuk mendapatkan visa tingkat 3. Namun kebijakan visa tingkat 3 setelah Referendum Brexit, pelajar yang berasal dari Uni Eropa maupun dari luar Uni Eropa harus menempuh prosedur yang sesuai dengan kebijakan visa bagi para pelajar dari luar Uni Eropa dan syarat-syarat tersebut dielaborasi menggunakan poin.

Dengan mengetahui tingkat visa yang akan diperoleh imigran, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan visa tersebut juga berbeda sesuai dengan maksud dan tujuan imigran datang ke Inggris. Menurut Parlemen Inggris, syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Datang untuk wisata (*Come to visit*)

Semua imigran dari semua belahan dunia dapat berkunjung ke Inggris dengan hanya membayar biaya untuk mendaftar aplikasi visa untuk tujuan wisata dan hanya berlaku selama 30 hari. Dalam jangka waktu tersebut, imigran dapat melakukan berbagai aktivitas sosial seperti mengunjungi keluarga, ataupun liburan (sebagai turis). Aksesibilitas visa dengan tujuan wisata bisa didapatkan oleh semua imigran dengan jangka waktu paling lama 30-60 hari, di dalam jangka

waktu tersebut imigran dapat mendatangi ataupun keluar dari Inggris. Akan tetapi, imigran yang ingin menetap lebih lama harus kembali mendaftarkan diri ke dalam visa yang tujuannya untuk menetap di Inggris.

b. Datang untuk bekerja (Come to work)

Imigran yang datang dengan tujuan bekerja harus memenuhi kriteria wajib di atas 50 poin, 20 poin kombinasi lainnya akan didapat dari total jumlah gaji yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut, bekerja di setengah pengangguran atau memiliki gelar yang relevan untuk pekerjaan tersebut. Minimal gaji per-tahun yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang ingin bekerja di Inggris berjumlah £20.480. Selain itu juga imigran harus lulus uji kemampuan berbahasa Inggris. Dengan total jumlah 20 poin tambahan yang dapat diperoleh para pekerja di Inggris apabila ingin memperbaharui visanya akan disesuaikan dengan pekerja tersebut, dengan misalkan apabila pekerja belum mencapai batas minimum gaji yang diperoleh per-tahunnya akan tetapi pekerja tersebut memiliki tingkat pendidikan atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya maka poin tersebut dapat diperoleh. Oleh karena itu, sistem kebijakan imigrasi berbasis poin tersebut akan memerlukan waktu yang cukup lama agar dampak dari kebijakan baru tersebut dapat dirasakan.

c. Datang untuk belajar (Come to study)

Pelajar yang ingin melanjutkan tingkat pendidikannya di Inggris harus menempuh 70 poin. Poin yang berjumlah 50 didapatkan dari dokumen yang berisikan tentang rincian konfirmasi telah diterimanya pelajar tersebut di universitas atau institusi akademik yang ada di Inggris, jurusan yang akan ditempuh, persyaratan kualifikasi yang sudah disetujui, tingkat akademik yang

akan ditempuh, hingga tempat studinya. Sisa 20 poin diperoleh dari kemampuan Inggris yang dimiliki oleh pelajar tersebut dan syarat minimum finansial yang harus dimiliki oleh imigran tersebut. Selain persyaratan yang harus dialui untuk dapat masuk ke Inggris, pelajar yang sudah menempuh tahun ajarannya di Inggris harus kembali melaporkan kegiatan akademik ke imigrasi Inggris apabila pelajar tersebut memutuskan untuk keluar dari Inggris dan mengakhiri visa khusus untuk pelajar (Ramli 2024).

2.2. Implementasi Kebijakan Two Steps Immigration

Setelah Brexit, pemerintah Inggris menerapkan kebijakan *Two Steps Immigration*, yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaannya, diantaranya yaitu:

1. Proses Pengajuan Visa Berbasis Point Melalui *Home Office*

Proses pengajuan visa berbasis poin dilakukan melalui Home Office, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem imigrasi. Berikut tatacara untuk proses pengajuan visa berbasis poin melalui *home office* yaitu:

- **Pendaftaran Online:** Pelamar harus mengajukan visa secara online melalui platform resmi dengan mengunggah dokumen yang relevan, seperti paspor, sertifikat bahasa Inggris, dan tawaran pekerjaan (untuk visa kerja).
- **Evaluasi Poin:** Sistem berbasis poin mengevaluasi kelayakan pelamar berdasarkan kriteria seperti gaji minimum, tawaran pekerjaan, dan keterampilan tertentu.

- Biaya Pengajuan: Pemohon harus membayar biaya visa serta "Immigration Health Surcharge" untuk mengakses layanan kesehatan selama tinggal di Inggris.
- Keputusan Cepat: Pemerintah memperkenalkan opsi "priority service" untuk mempercepat proses aplikasi.

2. Digitalisasi Sistem Imigrasi dan Proses Administrasi Pasca-Brexit

Untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, Inggris mendigitalisasi sistem imigrasi, yang meliputi:

- E-Visa dan Digital Status: Semua pemohon yang disetujui diberikan digital immigration status, menggantikan visa fisik tradisional.
- Portal Digital: Aplikasi visa, pembaruan izin tinggal, dan perpanjangan visa dilakukan secara online melalui portal imigrasi resmi.
- Sistem Pelacakan: Digitalisasi memungkinkan Home Office untuk melacak status imigrasi pelamar secara real-time dan mengurangi risiko penyalahgunaan visa. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat sistem lebih transparan dan memudahkan pengelolaan data imigrasi pasca-Brexit (Office 2023).

3. Pelatihan Petugas Imigran Untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Baru

Pemerintah Inggris menyadari pentingnya pelatihan bagi petugas imigrasi untuk menjalankan kebijakan baru secara efektif.

- Program Pelatihan: Petugas diberikan pelatihan khusus tentang kebijakan berbasis poin, digitalisasi sistem, dan prosedur baru pasca-Brexit.

- Pelatihan Lintas Budaya: Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas dapat menangani pelamar dari berbagai latar belakang secara profesional.
- Peningkatan Kapasitas: Langkah ini mencakup perekrutan tambahan dan pelatihan teknologi bagi petugas untuk mendukung sistem digital. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses imigrasi dilakukan secara adil, efisien, dan sesuai dengan kebijakan baru (I. O. Migration 2015).

Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), pemerintah Inggris menerapkan kebijakan *Two Steps Immigration* yang terdiri dari tahap pertama berupa visa sementara. Berikut adalah penjelasan mengenai proses dan persyaratan untuk mendapatkan visa kerja sementara, jenis-jenis pekerjaan yang menjadi prioritas (shortage occupation), serta pengaruh Brexit terhadap pekerja Uni Eropa yang kini harus memenuhi kriteria yang sama dengan non-UE.

1. Proses dan Persyaratan untuk Mendapatkan Visa Kerja Sementara

Untuk bekerja di Inggris, calon pekerja internasional harus mengajukan *skilled worker visa*. Proses dan persyaratannya meliputi:

- Tawaran Pekerjaan dari Sponsor yang Disetujui: Pelamar harus memiliki tawaran pekerjaan dari perusahaan Inggris yang telah disetujui oleh Home Office dan mendapatkan “certificate of sponsorship” Pekerjaan yang Memenuhi Syarat: Posisi yang ditawarkan harus termasuk dalam daftar pekerjaan yang memenuhi syarat.

- Gaji Minimum: Pelamar harus menerima gaji minimal yang ditentukan, yang bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan.
- Kemampuan Bahasa Inggris: Pelamar harus membuktikan kemampuan bahasa Inggris mereka melalui tes yang diakui atau kualifikasi akademik yang relevan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pelamar dapat mengajukan aplikasi visa secara online, membayar biaya yang diperlukan, dan menunggu keputusan dari Home Office (Hotcourses 2025).

2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Menjadi Prioritas (Shortage Occupation)

Pemerintah Inggris memiliki daftar *Shortage Occupation List* yang mencakup pekerjaan dengan kekurangan tenaga kerja domestik. Pelamar untuk posisi ini mendapatkan keuntungan seperti pengurangan persyaratan gaji minimum dan prioritas dalam proses aplikasi visa. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam daftar ini meliputi:

- Profesional kesehatan (dokter, perawat)
- Insinyur
- Profesional IT dan teknologi
- Profesional kreatif dan seni

Daftar ini diperbarui secara berkala berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja Inggris (Pearson 2025).

3. Pengaruh Brexit terhadap Pekerja Uni Eropa

Sebelum Brexit, warga negara Uni Eropa memiliki kebebasan bergerak dan bekerja di Inggris tanpa memerlukan visa. Namun, setelah Brexit, pekerja Uni

Eropa kini harus memenuhi kriteria yang sama dengan pekerja dari negara non-UE, termasuk:

- Mengajukan visa kerja melalui sistem berbasis poin
- Memiliki tawaran pekerjaan dari sponsor yang disetujui
- Memenuhi persyaratan gaji dan kemampuan bahasa Inggris

Perubahan ini telah menyebabkan penurunan jumlah pekerja Uni Eropa di Inggris dan mempengaruhi sektor-sektor yang sebelumnya bergantung pada tenaga kerja tersebut, seperti perhotelan, pertanian, dan perawatan kesehatan.

Secara keseluruhan, kebijakan imigrasi Inggris pasca-Brexit menuntut semua pekerja asing, termasuk dari Uni Eropa, untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat melalui sistem berbasis poin. Hal ini berdampak signifikan pada dinamika tenaga kerja dan perekonomian Inggris.

Pada kebijakan Two Steps Immigration di Inggris, tahap kedua adalah pengajuan Indefinite Leave to Remain (ILR), yang memberikan izin tinggal permanen kepada imigran setelah menyelesaikan tahap sementara (misalnya, visa kerja atau visa pelajar). Berikut adalah persyaratan utama untuk mendapatkan ILR:

1. Durasi Tinggal

- Masa tinggal minimal: Sebagian besar pemohon harus tinggal di Inggris selama lima tahun secara berkesinambungan di bawah visa yang memenuhi syarat (contohnya, Skilled Worker Visa atau Graduate Visa).
- Konsistensi status imigrasi: Tidak ada periode tinggal ilegal selama masa lima tahun ini (Hotcourses 2025).

2. Tidak Adanya Pelanggaran Hukum

Pemohon harus memiliki catatan hukum bersih. Pelanggaran serius (seperti tindak pidana atau pelanggaran imigrasi) dapat menyebabkan penolakan permohonan ILR (Flip 2025).

3. Kemampuan Berbahasa Inggris dan Tes Kewarganegaraan

- Kemampuan Bahasa Inggris: Pemohon harus membuktikan kemampuan bahasa Inggris mereka, baik melalui tes resmi (seperti IELTS) atau kualifikasi pendidikan yang relevan dalam bahasa Inggris.
- Life in the UK Test: Pemohon harus lulus tes ini, yang menguji pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan hukum Inggris sebagai bagian dari persyaratan kewarganegaraan (IELTS 2025).

4. Akses ke Status Permanen Setelah Tahap Sementara

- Setelah memenuhi persyaratan pada visa sementara, seperti Skilled Worker Visa, pelamar dapat mengajukan ILR sebagai langkah untuk mendapatkan status permanen.
- Status ILR memberikan hak untuk tinggal, bekerja, dan belajar tanpa batasan, serta akses penuh ke layanan publik seperti NHS (Office 2025).

BAB 3

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TWO STEPS IMMIGRATION PASCA
BREXIT TERHADAP IMIGRAN UNI EROPA DAN MASYARAKAT
INGGRIS (2020-2025)**

3.1. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Sasaran

Kebijakan publik bertujuan untuk memberikan pengaruh langsung pada kelompok yang menjadi target atau sasaran utama kebijakan. Dampak ini bisa berupa perubahan positif, seperti peningkatan kesejahteraan, akses lebih baik ke layanan publik, atau keuntungan lainnya. Namun, dampaknya juga dapat bersifat negatif, seperti menimbulkan ancaman, ketidaknyamanan, atau kerugian bagi kelompok sasaran. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelompok sasaran tersebut.

Kelompok sasaran utama dari kebijakan imigrasi pasca-Brexit adalah warga negara Uni Eropa (UE) yang tinggal di Inggris. Melalui skema EU Settlement Scheme (EUSS), mereka dapat mengajukan status "settled" jika telah tinggal selama lima tahun atau lebih, atau "pre-settled" jika kurang dari lima tahun. Status ini memungkinkan mereka dan keluarga untuk tetap tinggal dan bekerja di Inggris secara legal. Hal ini merupakan dampak negatif bagi imigran yang berasal dari Uni Eropa karena sebelumnya mereka bisa keluar dan masuk ke Inggris secara mudah dengan memanfaatkan paspor Uni Eropa milik mereka ketika Inggris masih termasuk kedalam bagian Uni Eropa. Berakhirnya kebebasan bergerak berarti bahwa semua pendatang baru dari UE, yang ingin tinggal dan

bekerja di Inggris, kini perlu memperoleh poin untuk memperoleh visa. Setelah Brexit, akses terhadap visa kerja warga UE yang ingin bekerja di Inggris harus melalui sistem imigrasi berbasis poin yang mensyaratkan tawaran pekerjaan dari pemberi kerja yang disetujui, kemampuan berbahasa Inggris, dan memenuhi ambang batas gaji tertentu. Hal ini merupakan dampak negatif bagi imigran Uni Eropa karena menyulitkan warga UE untuk bekerja di Inggris dibandingkan sebelumnya. Imigran Uni Eropa yang tinggal di Inggris sebelumnya hanya dengan paspor Uni Eropa milik mereka akan otomatis mendapatkan visa tingkat 2 general untuk bisa bekerja di Inggris akan tetapi sekarang mereka perlu mendapatkan poin dengan persyaratan tawaran pekerjaan dan pemberian kerja (Nathan 2020).

Pemerintah Inggris telah memperkenalkan Skema Penyelesaian Uni Eropa bagi warga negara Uni Eropa yang menetap di Inggris. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, skema ini memberikan kesempatan bagi warga Uni Eropa dan anggota keluarganya untuk tetap tinggal di Inggris secara permanen. Kesempatan tinggal permanen warga UE dengan status pre-settled harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan status settled setelah lima tahun tinggal (Sened 2018). Namun, banyak yang gagal mengajukan permohonan tepat waktu atau tidak memenuhi syarat, sehingga berisiko kehilangan hak tinggal permanen. Warga UE dengan status pre-settled menghadapi ketidakpastian dalam mengakses tunjangan sosial (O. Migration 2025). Beberapa kasus hukum menunjukkan inkonsistensi dalam keputusan pengadilan terkait hak atas bantuan sosial, yang dapat mengarah pada krisis hak-hak sosial bagi warga UE (O'Carroll 2024).

Proses aplikasi EUSS menimbulkan tantangan administratif, terutama bagi mereka dengan keterampilan digital rendah, kemampuan bahasa Inggris terbatas, atau kondisi kehidupan yang tidak stabil. Selain itu, status imigrasi diberikan secara digital (eVisa), yang menyulitkan beberapa individu dalam membuktikan status mereka. Skema Penyelesaian Uni Eropa (EUSS) adalah skema Kementerian Dalam Negeri yang dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Penarikan Diri Uni Eropa-Inggris. Skema ini dirancang untuk secara umum mempertahankan hak-hak yang dimiliki warga negara Uni Eropa dan anggota keluarga mereka yang bukan warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris pada tanggal 31 Desember 2020 sebelum Brexit dengan memberi mereka status imigrasi baru. Kebijakan ini memberikan dampak positif yaitu Skema EUSS memberikan jalur legal bagi warga UE yang sudah tinggal di Inggris untuk mempertahankan hak tinggal dan bekerja mereka. Perpanjangan otomatis masa berlaku status pre-settled hingga sepuluh tahun memberikan waktu tambahan bagi individu untuk memenuhi syarat mendapatkan status settled (Brindle and Fernandez-Reino 2024). Tetapi kebijakan ini juga memberikan dampak negatif yaitu banyak warga UE menghadapi ketidakpastian hukum dan administratif, terutama mereka yang gagal mengubah status pre-settled menjadi settled. Selain itu, sistem imigrasi baru menghambat masuknya pekerja UE, berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti kesehatan dan perawatan sosial (Alsford 2024).

Salah satu dampak negatif yang dialami yaitu ketidakpastian yang dialami oleh warga negara Uni Eropa (UE), khususnya terkait keterlambatan pemberian *certificate of application* oleh pemerintah Inggris. Dokumen ini merupakan bukti bahwa warga UE telah mengajukan permohonan tinggal melalui skema EU

Settlement Scheme (EUSS) dan seharusnya diberikan segera setelah aplikasi diterima, sebagaimana diatur dalam *Withdrawal Agreement* antara Inggris dan Uni Eropa. Namun, banyak warga UE mengeluhkan proses yang sangat lambat, bahkan berbulan-bulan tanpa kejelasan status. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan mereka, seperti kehilangan pekerjaan, akses terhadap layanan publik, dan tempat tinggal.

Salah satu contoh nyata adalah kasus Rolanda Miguens, seorang warga Portugal yang telah tinggal di Inggris sejak tahun 1997. Ia mengajukan permohonan pada Juni 2021, namun hingga berbulan-bulan kemudian belum menerima sertifikat yang dibutuhkan. Akibatnya, ia kehilangan kontrak kerja dengan layanan kesehatan nasional (NHS), tempat tinggalnya, dan bahkan akses ke transportasi umum. Pengalaman ini membuatnya merasa tidak berdaya dan kehilangan arah. Kasus serupa juga dialami oleh perempuan Nigeria yang merawat 2 anak warga negara Inggris. Perempuan tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut permohonannya ditolak, mengatakan bahwa ia telah menunggu surat keterangan permohonan sejak Juni. Meskipun telah tinggal secara sah dan mengajukan aplikasi melalui jalur manual, ia tidak mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah dan terancam kehilangan rumah serta tidak dapat mengikuti ujian profesional penting. Menanggapi tuduhan ini, Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) menyatakan bahwa sertifikat akan diberikan segera setelah dokumen identitas diverifikasi, terutama untuk permohonan manual atau berbasis kertas. Pemerintah juga menekankan bahwa warga UE yang tengah menunggu keputusan tetap diizinkan untuk bekerja dan bepergian keluar-masuk Inggris. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya

menjawab kekhawatiran para pemohon yang menghadapi ketidakpastian hukum dan administratif yang nyata (Webber 2024).

Jika dilihat dari penjelasan diatas imigran Uni Eropa yang di Inggris memutuskan untuk keluar dari Inggris agar tetap dapat memanfaatkan paspor Uni Eropa miliknya. Selain itu imigran dari luar yang ingin masuk ke Inggris juga disulitkan dengan adanya two steps immigration yang membuat arus masuk imigran menjadi terkontrol. Arus masuk imigran ke Inggris dan jumlah imigran di Inggris mengalami penurunan sejak ditetapkannya two steps immigration. Ini membuat kebijakan ini berhasil diterapkan oleh Inggris meskipun imigran mengalami dampak kerugian yang signifikan.

3.2. Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Selain Sasaran

Selain kelompok sasaran utama, kebijakan publik juga dapat memengaruhi kelompok lain di luar target yang dituju. Dampak ini sering kali tidak direncanakan, tetapi tetap signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dampaknya dapat berupa efek positif, seperti manfaat tambahan bagi masyarakat umum, atau efek negatif, seperti kerugian bagi kelompok tertentu yang tidak termasuk dalam target kebijakan.

Meskipun kebijakan imigrasi pasca-Brexit terutama ditujukan kepada warga negara Uni Eropa (UE), sejumlah kelompok non-sasaran turut merasakan dampaknya. Kelompok-kelompok ini meliputi warga Inggris, pengusaha lokal, pekerja domestik, imigran non-UE, serta institusi pendidikan tinggi seperti universitas. Perubahan dalam sistem imigrasi telah memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Inggris, menciptakan tantangan baru bagi kelompok-kelompok ini dalam berbagai aspek kehidupan. Sektor bisnis di Inggris mengalami kesulitan

dalam memperoleh tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya sangat bergantung pada pekerja UE, seperti perhotelan, ritel, konstruksi, dan transportasi. Menurut laporan dari Centre for European Reform dan UK in a Changing Europe, terdapat kekurangan sekitar 330.000 pekerja di Inggris akibat berakhirnya kebebasan bergerak pasca-Brexit . Kekurangan ini menyebabkan kenaikan biaya operasional, penurunan produktivitas, dan menambah beban logistik bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Protes and Springford 2023) .

Semua kelompok non-sasaran yang disebutkan terdampak negatif oleh perubahan kebijakan imigrasi pasca-Brexit ini. Keluarga-keluarga di Inggris juga merasakan dampak dari perubahan kebijakan imigrasi, khususnya dalam hal ketersediaan pekerja domestik. Sebelumnya, banyak keluarga mengandalkan pekerja dari UE untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Namun, dengan berakhirnya kebebasan bergerak dan diperketatnya aturan imigrasi, jumlah pekerja domestik dari UE menurun, menyulitkan keluarga dalam mencari bantuan domestik yang terjangkau dan terpercaya. Institusi pendidikan tinggi di Inggris menghadapi tantangan signifikan akibat penurunan jumlah mahasiswa dan staf dari UE.

Data menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa UE yang mendaftar di universitas Inggris menurun lebih dari setengah sejak Brexit. Universitas-universitas menyatakan berkurangnya mahasiswa program sarjana telah mengurangi keberagaman di ruang kelas dan melemahkan stabilitas keuangan perguruan tinggi, yang sebelumnya sangat bergantung pada mahasiswa Uni Eropa dengan masa studi tiga hingga empat tahun. Penurunan ini berdampak pada keuangan universitas, mengingat mahasiswa internasional, termasuk dari UE,

merupakan sumber pendapatan penting (O'carroll and Adams 2023). Beberapa universitas bahkan mempertimbangkan pemotongan staf dan penggabungan program studi untuk mengatasi defisit anggaran . Dampak dari kebijakan imigrasi pasca-Brexit tidak hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat Inggris secara keseluruhan. Kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dan peningkatan biaya hidup. Selain itu, penurunan keberagaman di institusi pendidikan dan tempat kerja dapat mengurangi dinamika sosial dan inovasi. Secara keseluruhan, perubahan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing Inggris di kancah global (Ghafaralli and Santoso 2025).

Seperti yang dialami oleh Cardiff University di Wales tengah menghadapi krisis keuangan serius dengan defisit anggaran. Sebagai langkah efisiensi, pihak universitas merencanakan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 400 staf dan berencana menutup sejumlah program akademik, termasuk jurusan bahasa modern, musik, sejarah kuno, teologi, dan keperawatan. Kebijakan ini akan mulai berlaku setelah tahun ajaran 2025 dan menimbulkan kekhawatiran luas, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah penurunan tajam jumlah mahasiswa internasional, yang turun hingga 16 persen. Mahasiswa internasional dikenal sebagai penyumbang pendapatan besar bagi universitas, karena mereka membayar biaya kuliah yang jauh lebih tinggi dibanding mahasiswa domestik. Kombinasi ini membuat banyak universitas di Inggris, termasuk Cardiff, kesulitan menyeimbangkan anggaran.

Rencana penutupan program keperawatan menjadi perhatian serius, terutama karena wilayah Wales saat ini mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Royal College of Nursing mengancam rencana tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang kontraproduktif di tengah krisis layanan kesehatan. Selain itu, pemangkasan program di bidang seni dan humaniora juga memicu kritik karena dianggap mengancam keberagaman dan kedalaman pendidikan tinggi di Inggris. Reaksi keras datang dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, alumni, dan anggota parlemen. Banyak dari mereka menyuarakan kekecewaan dan keprihatinan melalui media sosial dan forum publik. Situasi yang terjadi di Cardiff University bahkan disebut-sebut sebagai contoh dari krisis yang lebih besar yang sedang melanda sektor pendidikan tinggi di Inggris. Banyak universitas kini berada dalam posisi rentan, tergantung pada pendapatan dari mahasiswa asing dan menghadapi tekanan fiskal yang terus meningkat (University 2025).

Meskipun kebijakan imigrasi pasca-Brexit banyak mendapat sorotan karena dampak negatifnya terhadap kelompok tertentu, sejumlah dampak positif juga muncul, terutama bagi kelompok non-sasaran seperti warga Inggris, pengusaha lokal, dan institusi pendidikan. Salah satu dampak positif yang menonjol adalah meningkatnya kontribusi fiskal dari migran berketerampilan tinggi. Berdasarkan laporan Migration Advisory Committee migran berketerampilan tinggi menyumbang lebih besar terhadap pajak dibanding rata-rata pekerja lokal. Selain itu, dengan berkurangnya ketergantungan pada pekerja dari Uni Eropa, Inggris mulai membuka peluang bagi migran non-UE untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, khususnya di sektor kesehatan dan perawatan

sosial yang sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini juga mendorong diversifikasi tenaga kerja dan memperluas relasi global. Di sisi lain, kekurangan tenaga kerja murah mendorong banyak perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan otomatisasi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas (C. A. Migration 2024). Penelitian oleh Exadaktylos juga menunjukkan bahwa perusahaan yang merekrut manajer asing, terutama dari luar UE, mengalami lonjakan produktivitas sebesar 7–12%. Dari sisi pendidikan, meskipun jumlah mahasiswa dari UE menurun, kesempatan bagi mahasiswa internasional dari negara non-UE meningkat, memberikan universitas peluang baru untuk meraih pendapatan dan memperluas kerja sama akademik. Tak hanya itu, perubahan arah kebijakan ini tampaknya juga memengaruhi opini publik secara positif (Exadaktylos, Riccaboni and Rungi 2020). Survei dari National Centre for Social Research mencatat bahwa lebih dari separuh masyarakat Inggris kini menilai imigrasi berdampak positif bagi perekonomian nasional, meningkat tajam dari dua dekade sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan imigrasi pasca-Brexit meski kompleks, juga membawa sejumlah manfaat strategis bagi Inggris dalam jangka panjang (N. C. Research 2023).

Menurut Dye kebijakan terhadap kelompok non sasaran ini juga mencakup kepada biaya kerugian atau manfaat yang dikeluarkan oleh non sasaran. Dalam hal ini berbagai pihak yang bukan imigran seperti universitas di Inggris dan perusahaan produksi mengalami biaya kerugian akibat kebijakan two steps immigration. Biaya yang dikeluarkan sangat besar karena perusahaan produksi harus mengurangi produksi jumlah barang yang bisa dihasilkan dan universitas mengalami penurunan uang masuk akibat menurunnya mahasiswa.

3.3. Dampak Kebijakan Terhadap Kondisi Saat Ini dan Masa Depan

Kebijakan publik memiliki konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti pola ekonomi, kondisi sosial, atau dinamika politik masyarakat. Indikator ini mempertimbangkan bagaimana kebijakan memengaruhi stabilitas dan perkembangan masyarakat saat ini, serta bagaimana dampaknya dapat dirasakan di masa depan. Sejak diberlakukannya kebijakan *Two Steps Immigration* pasca-Brexit, dampak negatif yang signifikan mulai dirasakan, baik dalam jangka pendek yaitu pada tahun 2020–2025 maupun jangka panjang. Pada masa transisi ini, salah satu konsekuensi paling nyata adalah menurunnya arus migrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa ke Inggris. Hal ini terjadi setelah dicabutnya prinsip *freedom of movement*, yang sebelumnya menjadi fondasi utama bagi tenaga kerja untuk berpindah antarnegara di Eropa. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, jumlah pengajuan visa kerja dari warga negara Uni Eropa menurun drastis hingga 70%. Penurunan ini mencerminkan perubahan kebijakan imigrasi Inggris yang kini lebih ketat dan menggunakan sistem poin (Migration Observatory, 2024).

Namun Dalam sektor ketenagakerjaan juga, terutama di bidang yang membutuhkan keterampilan rendah seperti perhotelan, konstruksi, dan pertanian, terjadi kekurangan tenaga kerja akibat berkurangnya pekerja dari UE. Meskipun ada peningkatan visa untuk pekerja dari luar UE, hal ini belum sepenuhnya mengimbangi kekurangan tenaga kerja. Dari segi integrasi sosial, penghapusan kebebasan bergerak dan penerapan sistem imigrasi baru telah memperumit proses bagi warga UE untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Hal ini berdampak pada hubungan sosial antara warga UE dan masyarakat Inggris, serta meningkatkan

tantangan dalam integrasi sosial hingga akhirnya terjadi Krisis BBM di Inggris pada tahun 2021 lalu (Migration Observatory, 2024).

Krisis Bahan Bakar Minyak di Inggris tahun 2021 terjadi karena kurangnya pengemudi mobil pembawa bahan bakar minyak. Pengemudi mobil pembawa BBM mayoritas diisi oleh imigran Uni Eropa sejak bertahun-tahun. Setelah pergantian kebijakan, banyak dari imigran Uni Eropa memilih keluar dari Inggris sejak 2020. Keluarnya imigran dari Inggris bertujuan agar imigran tetap dapat memanfaatkan visa Uni Eropa miliknya di negara lain. Selain itu warga asli Inggris juga enggan melamar pekerjaan sebagai pengemudi mobil pembawa BBM karena pekerjaan ini dianggap pekerjaan imigran. Mereka tidak mau memiliki lingkungan kerja yang sama dengan para imigran (CNBC 2021). Selain itu, pasca pergantian kebijakan imigrasi untuk menjadi pengemudi pembawa mobil BBM membutuhkan pelatihan khusus dan juga lisensi mengemudi tambahan. Banyaknya imigran Uni Eropa yang keluar dari Inggris, sulitnya calon imigran untuk masuk ke Inggris, dan masyarakat yang enggan bekerjasama dengan imigran pada akhirnya membuat terjadinya krisis BBM (SindoNews 2021).

Ketika terjadinya krisis BBM banyak warga Inggris yang melakukan konvoi dan mengikuti mobil pembawa BBM dengan asumsi bahwa mobil tersebut sedang membawa BBM dan akan disalurkan ke pom bensin terdekat (O. Migration 2024). Selain itu banyak SPBU yang tutup karena tidak mendapatkan pasokan BBM. Berdasarkan laporan The Petrol Retailers Association (PRA) sekitar 50-90% SPBU kehabisan stok bahan bakar sehingga seluruh daerah di Inggris mengalami krisis energi. PRA mewakili pengecer BBM swasta kini mendominasi pasar bahan bakar di Inggris. Hal ini juga membuat harga BBM

tidak terkendali dan naik puluhan hingga ratusan persen akibat kelangkaan (SindoNews 2021).

Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak positif. Kebijakan ini memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah Inggris untuk menyaring masuknya migran berdasarkan keterampilan dan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional. Sistem poin memungkinkan Inggris lebih selektif dalam menerima tenaga kerja berketerampilan tinggi. Selain itu dalam menghadapi krisis BBM, Pemerintah Inggris pada akhirnya menyelesaikan masalah krisis ini dengan cara memberikan visa sementara sebanyak 10.500 imigran yang langsung dipekerjakan sebagai pengemudi mobil pembawa BBM dan sektor peternakan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan pasukan militer untuk bersiaga agar dapat membantu melakukan pengawalan terhadap distribusi BBM menuju ke daerah-daerah untuk mengurangi terjadinya konvoi dan tindakan kriminal lain (Laucereno 2021).

Keberlanjutan kebijakan imigrasi pasca-Brexit masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak mengusulkan reformasi sistem berbasis poin untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk memperkenalkan kriteria poin yang lebih fleksibel dan jalur masuk bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Selain itu, penggunaan inovasi digital seperti e-visa dan identitas digital diharapkan dapat mempercepat proses imigrasi, meskipun perlu perhatian terhadap privasi data dan aksesibilitas bagi semua pemohon. Hubungan antara Inggris dan UE menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pemerintah Inggris, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, telah mengambil langkah-langkah untuk mempererat kerja sama dengan UE, termasuk dalam bidang

keamanan dan perdagangan . Meskipun tidak ada rencana untuk kembali bergabung dengan UE, pendekatan pragmatis ini menunjukkan kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan imigrasi di masa depan untuk mendukung hubungan yang lebih erat dengan UE.

3.4. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Secara Langsung

Setiap kebijakan membutuhkan sumber daya, termasuk dana dan waktu, untuk diimplementasikan. Indikator ini menilai sejauh mana efisiensi biaya pelaksanaan kebijakan dan apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang diharapkan. Efektivitas biaya menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut layak diterapkan dan tidak membebani anggaran secara berlebihan. Berikut adalah dampak kebijakan terhadap biaya secara langsung:

1. Analisis Biaya Langsung Yang Dikeluarkan Pemerintah

Menurut artikel dari Reuters, Pemerintah Inggris mengeluarkan sekitar £4,7 miliar untuk membangun dan mengoperasikan sistem perbatasan baru. Biaya ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik, pengadaan teknologi pemeriksaan barang, sistem pemeriksaan digital, pelatihan staf, hingga pembayaran kontrak dengan konsultan. Proyek ini melibatkan lebih dari 13 program utama yang dirancang untuk memperketat dan mengelola lalu lintas barang yang masuk dari Uni Eropa ke Inggris. Namun, implementasi kebijakan ini mengalami lima kali penundaan sejak berakhirnya masa transisi Brexit pada 31 Desember 2020. Audit Nasional Inggris (National Audit Office/NAO) bahkan mengkritik kurangnya perencanaan lintas departemen dan tidak jelasnya strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola perbatasan secara digital dan efisien menyebabkan pemborosan dana seperti pembangunan fasilitas yang belum digunakan dan

perekrutan staf yang tidak aktif. Ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan serta munculnya biaya langsung yang cukup besar tanpa hasil yang optimal (Reuters 2024).

2. Analisis Biaya Langsung Bagi Imigran

Imigran menghadapi beban finansial yang meningkat akibat kebijakan imigrasi baru. Pemerintah Inggris menjelaskan bahwa Untuk mendapatkan visa kerja di Inggris, para imigran harus menyiapkan sejumlah biaya yang terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, terdapat biaya aplikasi visa yang jumlahnya bervariasi tergantung pada jenis visa yang diajukan. Bagi pemohon Graduate Visa, biaya aplikasinya sebesar £822, sementara untuk pemohon High Potential Individual (HPI) Visa, biaya yang dikenakan adalah £715 (Hotcourses 2025). Kedua, pemohon visa juga wajib membayar Immigration Health Surcharge (IHS) atau biaya layanan kesehatan imigrasi yang harus dibayar oleh pemohon visa. Biaya ini merupakan bagian dari aplikasi visa dan wajib dibayarkan agar pemohon dapat mengakses layanan kesehatan National Health Service (NHS) selama tinggal di Inggris. Tarif IHS adalah £776 per tahun untuk mayoritas pemohon visa, termasuk pelajar dan pekerja. Jika seseorang mengajukan visa selama 3 tahun, maka total biaya IHS yang harus dibayarkan adalah £2.328 (yaitu £776 dikalikan 3 tahun) (Office 2025). Hal ini merupakan dampak negatif bagi imigran karena imigran harus mengeluarkan uang lebih dibanding sebelumnya ketika kebijakan ini belum berlangsung.

3.5. Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Tidak Langsung

Kebijakan yang diambil sering kali mengabaikan atau mengesampingkan kebijakan alternatif lain. pengaruh kebijakan publik yang menimbulkan

pengeluaran atau kerugian tidak secara langsung tercatat dalam anggaran atau laporan resmi, tetapi tetap berdampak signifikan terhadap masyarakat atau sektor tertentu. Ada beberapa dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung yaitu:

1. Dampak terhadap sektor tertentu

Kekurangan tenaga kerja juga telah membebani ekonomi Inggris. Sebelum Brexit, bisnis dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka melalui pasar tenaga kerja terpadu Uni Eropa. Sejak berakhirnya pergerakan tenaga kerja bebas, sektor-sektor penting seperti pertanian, perikanan, logistik, perawatan kesehatan, dan perhotelan semuanya mengalami kekurangan tenaga kerja, yang mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi sekaligus membatasi hasil produksi. Sebaliknya, ekonomi Uni Eropa mampu memanfaatkan pasar tenaga kerja terpadu mereka untuk merespons tantangan tenaga kerja pascapandemi dengan lebih fleksibel. Kekurangan tenaga kerja terampil telah meningkatkan tantangan operasional, yang menyebabkan produktivitas lebih rendah dan biaya tenaga kerja lebih tinggi karena perusahaan bersaing untuk mendapatkan jumlah pekerja yang lebih sedikit (N. I. Research 2025).

Sektor pertanian dan perikanan merasakan dampak Brexit secara langsung, terutama terkait dengan akses ke perairan dan pasar. Kesepakatan perdagangan khusus diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pasca Brexit Banyak petani dan pelaku perikanan di Inggris bergantung pada tenaga kerja musiman dari Uni Eropa. Dengan sistem imigrasi baru pasca-Brexit, terjadi penurunan drastis jumlah pekerja migran yang dapat masuk, sehingga berdampak pada produktivitas panen dan pengolahan hasil laut. Petani dan nelayan Inggris sebelumnya mendapat akses bebas tarif dan bebas kuota ke pasar UE. Setelah Brexit,

walaupun ada kesepakatan perdagangan, muncul hambatan non-tarif seperti pemeriksaan bea cukai, sertifikasi sanitasi, dan dokumen ekspor tambahan. Hal ini menyebabkan keterlambatan distribusi dan kerugian finansial, khususnya untuk produk segar seperti ikan dan hasil pertanian yang cepat rusak (VOA 2021).

Brexit juga memperburuk kekurangan tenaga kerja di sektor logistik dan manufaktur, di mana pengurangan pekerja Uni Eropa berdampak signifikan. Menurut survei Financial Times, 45% perusahaan logistik melaporkan kesulitan dalam mengisi posisi, yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan operasi yang efisien. Perusahaan logistik yang kesulitan mencari pengemudi dan staf gudang mungkin menghadapi keterlambatan dalam memindahkan barang melalui rantai pasokan, yang memperburuk keterlambatan pengiriman (Zycus 2024)

2. Dampak ekonomi global

Salah satu dampak terbesar dari Brexit adalah ketidakpastian ekonomi global terhadap mata uang dunia. Ketidakpastian politik dan ekonomi di Inggris dan Uni Eropa menciptakan volatilitas di pasar global, yang mempengaruhi investor dan trader di seluruh dunia. Hal ini dapat mengarah pada pergeseran besar dalam aliran modal, yang selanjutnya berdampak pada nilai tukar mata uang salah satunya yaitu Pound Sterling (GBP) pada mata uang Inggris. Sejak pengumuman hasil referendum, nilai GBP jatuh tajam terhadap mata uang utama lainnya. Pada saat itu pasar global merespon ketidakpastian yang timbul akibat keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Fluktuasi besar pada GBP terus terjadi dalam beberapa tahun setelah referendum, meskipun terdapat periode pemulihan sementara. Ketidakpastian politik di Inggris, termasuk negosiasi yang berlarut-

larut mengenai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, semakin menambah volatilitas mata uang ini. Pasar cenderung menghindari risiko ketika ketidakpastian tinggi, yang menyebabkan investor menarik diri dari aset yang dianggap berisiko seperti GBP. Penurunan nilai GBP ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi domestik Inggris tetapi juga pasar global, karena Inggris adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia (Iqbal 2024).

3. Gangguan rantai pasokan

Brexit menciptakan ketidakpastian seputar stabilitas pasokan barang dan jasa antara Inggris dan UE. Perubahan peraturan perbatasan memaksa perusahaan untuk mencari rute perdagangan baru dan mengalami peningkatan waktu pengiriman. Gangguan ini dapat merusak kerapatan dan kecepatan rantai pasokan, menghambat bisnis yang bergantung pada pengiriman tepat waktu. Gangguan ini telah memengaruhi berbagai sektor seperti dari otomotif hingga barang konsumen yang menyebabkan tenggat waktu terlewat, penundaan di perbatasan, kekurangan bahan utama, pengintaian dan dalam beberapa kasus hilangnya bisnis. Selain itu Perusahaan di Inggris mengalami penundaan yang signifikan dengan prosedur bea cukai yang memperpanjang jangka waktu pengiriman rata-rata 30%. Gangguan ini telah memaksa bisnis untuk memikirkan kembali strategi rantai pasokan mereka yang menekankan perlunya ketahanan yang lebih besar (Zycus 2024).

Pabrik Honda di Swindon Inggris terpaksa menghentikan operasional akibat keterlambatan pengiriman suku cadang dari Asia Timur. Penundaan ini disebabkan oleh kemacetan di pelabuhan utama seperti Felixstowe, Southampton, dan London Gateway, yang terjadi karena lonjakan permintaan di masa pandemi serta ketidakpastian menjelang akhir masa transisi Brexit. Sistem produksi Honda

yang mengandalkan metode “just-in-time” sangat bergantung pada pengiriman tepat waktu, sehingga keterlambatan logistik langsung memengaruhi proses produksi. Masalah ini semakin parah dengan kenaikan biaya pengiriman global dan kelangkaan kontainer dari Tiongkok. Honda bahkan mempertimbangkan opsi pengiriman lewat udara untuk menghindari kerugian yang lebih besar .

Situasi ini memunculkan tekanan politik kepada pemerintah Inggris, terutama dari oposisi dan serikat pekerja, untuk segera menangani krisis logistik yang juga berdampak pada sektor ritel dan menjelang musim Natal. Selain itu, banyak pihak khawatir bahwa setelah masa transisi Brexit berakhir pada Januari 2021, masalah perdagangan akan semakin rumit dengan tambahan beban administratif dan bea cukai baru. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana rantai pasokan global sangat rentan terhadap perubahan kebijakan dan gangguan eksternal, terlebih dalam konteks Brexit dan pandemi (Jolly 2020).

Banyak perusahaan dan industri di Eropa beroperasi dalam sistem rantai pasokan lintas batas yang kompleks, yang berarti bahwa pemasangan hambatan perdagangan baru memiliki dampak biaya langsung maupun tidak langsung yang kompleks. Pengamatan jadwal tarif saja tidak dapat memberi tahu kita bagaimana biaya untuk industri tertentu di wilayah tertentu akan meningkat, karena kita perlu mempertimbangkan bagaimana kenaikan biaya ini meresap ke seluruh sistem rantai pasokan di semua sektor dan wilayah lain tempat perusahaan terhubung. Oleh karena itu keduanya harus diperhitungkan secara eksplisit (Thissen 2020)

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan Two Steps Immigration yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit merupakan bentuk kontrol imigrasi yang ketat dengan tujuan mengembalikan kedaulatan atas kebijakan perbatasan dan tenaga kerja. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada imigran Uni Eropa, khususnya mereka yang berada di Inggris sebelum dan sesudah Brexit. Imigran yang sudah berada di Inggris diberikan pilihan untuk mengakses skema EU Settlement Scheme yang terbagi menjadi dua status, yaitu pre-settled dan settled. Namun, banyak dari mereka menghadapi kesulitan administratif, risiko kehilangan status hukum, ketidakpastian sosial, serta risiko kehilangan hak tinggal karena kegagalan memenuhi syarat *settled*. Selain itu warga UE yang ingin masuk dan bekerja di Inggris harus melalui sistem imigrasi baru yang ketat, seperti syarat tawaran kerja, kemampuan bahasa Inggris, dan batas gaji minimum. Hal ini menyulitkan migrasi pekerja dari Eropa dan turut berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor vital seperti kesehatan dan perawatan sosial

Selain kelompok sasaran, kelompok non-sasaran seperti warga Inggris, pengusaha, pekerja domestik, serta institusi pendidikan turut terdampak. Dunia usaha mengalami kesulitan mencari tenaga kerja terampil dan tidak terampil, sementara universitas kehilangan sumber pendapatan dari mahasiswa Uni Eropa. Hal ini berkontribusi pada penurunan produktivitas, peningkatan kesenjangan sosial, dan potensi krisis sosial ekonomi dalam jangka panjang.

Biaya langsung yang ditanggung oleh pemerintah maupun imigran meningkat drastis. Pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk pengembangan sistem digitalisasi imigrasi dan pelatihan petugas, sedangkan imigran dibebani biaya tinggi untuk visa, asuransi kesehatan, hingga jasa hukum.

Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh pemerintah juga sangat besar karena perubahan kebijakan pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dalam negeri dan rantai ekonomi global khususnya keterlambatan distribusi akibat gangguan rantai ekspor impor dan hambatan non tarif.

Secara keseluruhan, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan imigrasi dan justru menciptakan tantangan baru. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berisiko memperburuk citra Inggris sebagai negara terbuka, menghambat integrasi sosial, dan mengurangi daya saing nasional. Ketatnya kebijakan ini juga berpotensi mendorong peningkatan imigran ilegal dan membebani sistem hukum serta pelayanan sosial lokal.

4.2 Rekomendasi

Setelah analisis dan kesimpulan dari penelitian diatas, penulis berhasil menjelaskan dampak dari kebijakan two steps immigration pasca brexit terhadap imigran Uni Eropa tahun 2020-2025. Akhir kata, penulis berharap dan merekomendasikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat kembali meneliti kebijakan two steps immigration di masa yang akan datang dengan pembaruan cakupan tahun penelitian dan dampak kebijakan two steps immigration terhadap imigran ilegal di Inggris pasca pergantian kebijakan imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afinotan, L Andy. 2014. "Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis." *Canadian Social Science* 10(5), 249-256.
- Alsford, Luke. 2024. "How Brexit resulted in immigration going up. The London Economic." <https://www.thelondoneconomic.com/politics/how-brexit-resulted-in-immigration-going-up-380097>.
- Brid, Paul W, Cistopher Holmes Holmes, Daniel Pan, Cistopher A Martin, dan Manish Pareek. 2023. "Awareness of HIV, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis and COVID-19 in migrant students in the UK: A pilot survey." *Journal Of Infection* 86(3) e36-e38.
- Brindle, Ben, dan Marina Fernandez-Reino. 2024. "Migrants' Experiences Of The UK Immigration System." *Migration Observatory*. <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/migran>.
- CNBC, Indonesia. 2021. "Terungkap, ini Biang Kerok yang Bikin Krisis di Inggris." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210929212000-4-280235/terungkap-ini-biang-kerok-yang-bikin-krisis-di-inggris>.
- Darmayadi, Andrias. 2018. "Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VIII(2).
- Darwis, Danial, dan Theyana Howay. 2021. "Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya Bagi Perekonomian." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* I(2), 69-82.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Dennison, James, dan Andrew Geddes. 2018. "Brexit and the perils of 'Europeanised' migration." *Journal of European Public Policy* 25(8), 1137-1153.
- Exadaktylos, dimitrios, Messimo Riccaboni, dan Armando Rungi. 2020. *Talents from Abroad Foreign Managers and Productivity in the United Kingdom*.
- Flip, English School. 2025. "Antisipasi Penolakan SDUWHV! Ini Tipsnya." <https://flipenglishschool.com/mengantisipasi-penolakan-sduwhv/#:~:text=Riwayat%20kriminal%20bisa%20menjadi%20alasan%20Openolakan%20visa,memiliki%20surat%20keterangan%20bebas%20dari%20catatan%20kriminal>.
- Francisca, Yovita, Nanik Trihastuti, dan Kholis Roisah. 2017. "Implikasi Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom." *Diponegoro Law Journal* 6(2), 1-18.
- Ghafaralli, Arghaza, dan Rizal Budi Santoso. 2025. "THE IMPACT OF BREXIT ON WORK PERMIT REGULATIONS IN THE UK." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 2(8).
- Hartanto. 2018. "Referendum Brexit Dan Kembali Mengemukanya Kedaulatan Negara Serta Dampaknya Bagi Dunia Dan Indonesia." *Jurnal POPULIS* I(1) 51-62.
- Hotcourses, Indonesia. 2025. "Panduan Lengkap UK Global Talent Visa." <https://www.hotcourses.co.id/study-in-the-uk/visa-guides/panduan-lengkap-uk-global-talent-visa/>.

- . 2025. “Persyaratan Mendapatkan Visa Kerja Inggris .” <https://www.hotcourses.co.id/study-in-the-uk/visa-guides/persyaratanmendapatkan-visa-kerja-inggris/>.
- IDP, ILTS. 2025. “Skor IELTS Minimum Untuk Bekerja Di Inggris Dan Menetap Di Sana Tahun 2025.” <https://ielts.idp.com/indonesia/about/news-and-articles/article-ielts-score-to-work-and-get-pr-in-uk>.
- IELTS, Asia. 2025. “IELTS for the UK.”” <https://www.ieltsasia.org/id/ielts-for-uk#:~:text=IELTS%20Life%20Skills%20B1,Inggris%20untuk%20Visa%20Kewarganegaraan/%20Bermukim>.
- Iqbal. 2024. “Brexit dan Efeknya pada Pasar Mata Uang Dunia.” <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/brexit-dan-efeknya-pada-pasar-mata-uang-dunia-23087>.
- Jolly, Jasper. 2020. “UK Port Delays Force Honda Shutdown of Swindon Plant.” *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/business/2020/dec/10/uk-port-delays-force-honda-shutdown-of-swindonplant#:~:text=A%20spokesman%20said:%20%E2%80%9CHonda%20UK,trade%20deal%20with%20the%20EU>.
- Kalantaryan, Sona, Marco Scipioni, Fabrizio Natale, dan Alfredo Alessandrini. 2021. “Immigration and integration in rural areas and the agricultural sector: An EU perspective.” *Journal Of Rural Studies* 88 (462-472).
- Kaukab, M Elfan, dan Wiji Yuwono. 2020. “Komunikasi Dalam Negosiasi Politik Brexit.” *Jurnal Komunikasi & Bahasa* 1(2), 106-120.
- Kultsum, Fidyah Faridah, dan Erlina Wiyanarti. 2018. “Dinamika Inggris Dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit.” *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7(2), 163-174.
- Laucereno, F S. 2021. “Terungkap! Ini Biang Kerok Yang Bikin Inggris Krisis BBM.” *Detik Finance*. In <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5744637/terungkap-ini-biang-kerok-yang-bikin-inggris-krisis-bbm>.
- Migration, Committee Advisory . 2024. “MAC Annual Report 2024.” *Smith Stone Walters*.<https://smithstonewalters.com/news/migration-advisory-committee-mac-publishes-2024-annual-report?>
- Migration, International Organization For. 2015. “The Essentials of Migration Practice: A Training Manual for Immigration Officers.” *Gevana: International Organization For Migration*.
- Migration, Observatory. 2024. “Integration In The UK And The Post-Brexit Immigration System.” <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/integration-in-the-uk-and-the-post-brexit-immigration-system>.
- . 2025. “Migrants’ experiences of the UK immigration system.” *University of Oxford*. <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/integration-in-the-uk-and-the-post-brexit-immigration-system/>.
- Nathan, Grassi. 2020. “Unsettled Status – 2020: Which EU Citizens are at Risk of Failing to Secure their Rights after Brexit?” *Migration Observatory, University of Oxford*. <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/unsettled-status-2020/>.

- Nurtyandini, Resqita Trisya. 2022. "The Impact Of The Brexit Referendum On European Union Immigration Policy In The UK." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2(1) 44-53.
- O'Carroll, L. 2024. "Courts place UK's post-Brexit scheme for EU citizens at risk, experts warn." *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/politics/article/2024/jul/25/uk-post-brexit-scheme-eu-citizens-courts>.
- O'carroll, L, dan R Adams. 2023. "Number of EU students enrolling in UK universities halves post-Brexit." *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/education/2023/jan/27/number-eu-students-enrolling-uk-universities-down-half-since-brexit>.
- Office , Home. 2025. "Pay for UK healthcare as part of your immigration application." <https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay>.
- Office, Home. 2023. "The UK's points-based immigration system: information for EU citizens." *GOV.UK*.
- . 2025. "Skilled Worker visa." <https://www.gov.uk/skilled-worker-visa>.
- Pearson, PTE. 2025. "The great UK skills shortage: 5 occupations that can help you move abroad." <https://www.pearsonpte.com/articles/the-great-uk-skills-shortage-5-occupations-that-can-help-you-move-abroad>.
- Pertiwi, Rahmatya Nur Wibi. 2018. "Faktor Yang Mempengaruhi Opini Publik Britania Raya Terkait Kebijakan Brexit Tahun 2016." *Global & Policy* 6(2), 170-187.
- Protes, j, dan J Springford. 2023. "Early impacts of the post-Brexit immigration system on the UK labour market." *Centre for European Reform*.
<https://www.cer.eu/insights/post-brexit-immigration-uk-labour-market>.
- Putra, I Gede Prastha Pratama, Sukma Susanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi. 2016. "1Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris." 1-12.
- Qomaruddin, dan Halimah sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal Of Management, Accounting and Administration* 77-84.
- Ramli, Sofya. 2024. "Kebijakan Luar Negeri Inggris Atas Hak Tinggal Imigran Pasca Referendum Brexit Uni Eropa." *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* I(1), 30-43.
- Research, National Centre for Social. 2023. "British Social Attitudes 41: Immigration." <https://natcen.ac.uk/publications/british-social-attitudes-41-immigration>.
- Research, National Institute of Economic and Social. 2025. "Five years' economic impact of Brexit." <https://niesr.ac.uk/blog/five-years-economic-impact-brexit>.
- Reuters. 2024. "UK's post-Brexit border arrangements to cost \$6 billion ." <https://www.reuters.com/world/uk/uks-post-brexit-border-arrangements-cost-6-bln-2024-05-19/>.
- Rezkyniine, Milla Shanthi, Trilke E Tulung, dan Stefanus Sampe. 2018. "Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Tentang Keluarnya Britania Raya Dari Uni Eropa Pada Tahun 2016." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* I(1).

- SD, Hardi Alunaza, dan Virginia Sherin. 2018. "Pengaruh British Exit (BREXIT) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran." *Journal Of International Studies* 2 (2), 156.
- Sened, R. 2018. "Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap." <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.4>.
- SindoNews. 2021. "Inggris Dihantam Krisis BBM, Fenomena Apa Ini?" <https://ekbis.sindonews.com/read/554124/34/inggris-dihantam-krisis-bbm-fenomena-apa-ini-1632888586>.
- Stefanie, Karina. 2022. "Keluarnya Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional." *Gloria Justitia* 2(1), 62-85.
- Thissen, M. 2020. "The implications of Brexit for UK and EU regional competitiveness." *Economic Geography* 96(5) 397-421.
- University, Cardiff. 2025. "Cardiff University to cut 400 staff and drop subjects including nursing and music." <https://www.bbc.com/news/articles/c0k5n0k1011o?>.
- VOA. 2018. "Pasca Brexit, Inggris Prioritaskan Tenaga Kerja Ahli." <https://www.voaindonesia.com/a/pasca-brexit-inggris-prioritaskan-tenaga-kerja-ahli/4595824.html>, 02 10.
- . 2021. "Perjanjian dagang Brexit perkuat posisi Inggris di sektor perikanan." <https://www.voaindonesia.com/a/perjanjian-dagang-brexit-perkuat-posisi-inggris-di-sektor-perikanan/5716950.html>.
- Webber, Ester. 2024. "UK Accused of Leaving EU Citizens in Limbo over Post-Brexit Residence." *Politico*. <https://www.politico.eu/article/uk-eu-citizens-limbo-post-brexit-residence/>.
- Zycus. 2024. "Brexit impact on supply chains in UK: Challenges and post-Brexit strategies." <https://www.zycus.com/blog/procurement-strategies/brexit-impact-on-supply-chains-in-uk>.